



## PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA-HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)



### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) MATA KULIAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (HAN)

#### Pengantar Penjelasan :

1. Desain dari RPS ini adalah 4 sks, per minggu 2 x pertemuan, total 26 minggu diluar minggu UTS dan UAS. Dalam hal terdapat perbedaan beban sks, dapat menyesuaikan materi dalam RPS ini.
2. Penjabaran pada setiap pertemuan dapat berupa pengajaran (lecture) atau tutorial. Dalam tutorial harus dibuat modul tutorial, dengan kisi-kisi materi menurut RPS ini. Dalam RPS ini didesain topik yang lebih dari 1 x pertemuan dapat dibuat dalam bentuk Tutorial. Selain itu, secara tematik dapat ditentukan studi kasus untuk merespons isu-isu actual berdasarkan landasan teori Hukum Administrasi Negara.
3. Konten materi pada pokoknya adalah Aturan, Doktrin/Konsep, dan Putusan. Oleh karena itu menunjukkan dan menganalisa putusan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pembelajaran.
4. Sumber belajar dapat dikembangkan lebih luas, mencakup pula artikel jurnal, hasil penelitian dan sumber belajar dalam bentuk lain seperti video. Sumber belajar diberikan secara detil yakni bagian/ bab dan halaman, untuk itu sumber belajar yang disebutkan dalam RPS ini perlu didetailkan pada setiap Fakultas Hukum.
5. Pada kolom bobot nilai (9) dapat ditentukan oleh setiap fakultas/ prodi.
6. Format RPS dapat disesuaikan dengan standar pada fakultas/prodi.

#### B. IDENTITAS MATA KULIAH

1. Nama Mata Kuliah	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
2. Kode Mata Kuliah	--
3. Beban Studi (sks)	4 sks
4. Semester	--
5. Program Studi/ Jurusan	Ilmu Hukum

<p><b>6. Capaian Pembelajaran Lulusan</b></p>	<p>a. KK: a Mampu mengidentifikasi masalah hukum berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah. Mampu mengkualifikasi masalah hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Mampu menerapkan asas, kaidah dan norma hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.</p> <p>KU: e Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.</p>
<p><b>7. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah</b></p>	<p>Mahasiswa (A) mampu menganalisis (B) permasalahan Hukum Administrasi Indonesia (C) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori ketatanegaraan (D). (C4)</p>
<p><b>8. Deskripsi Mata Kuliah</b></p>	<p>Kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan mata kuliah yang membahas mengenai sejarah HAN, hubungan HAN dengan bidang hukum lainnya, sifat HAN dalam berbagai tipe negara, karakteristik HAN, peristilahan, sumber HAN, hakekat fungsi dan wewenang pemerintahan, tindakan pemerintahan, instrumen pemerintahan, AUPB, kedudukan hukum pejabat publik, pengawasan, deviasi perbuatan pemerintahan, penegakan hukum administrasi, sanksi administrasi.</p>
<p><b>9. Prasyarat (bila ada)</b></p>	
<p><b>10. Penanggung Jawab</b></p>	
<p><b>11. Dosen Pengampu</b></p>	

## 12. Daftar Sumber Belajar

### Daftar Referensi:

1. Prajudi Atmosudirjo, 1983, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Ghalia Indonesia, Jakarta
2. Soehino, 2000, *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta
3. Philipus M. Hadjon, et all, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
4. Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta
5. S.F Marbun dan Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta
6. Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
7. Ridwan HR, 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta
8. Sudikno Mertokusumo, 2014, *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
9. Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca -Amandemen Konstitusi)*
10. Cekli Setya Pratiwi, et all, 2016, *Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*
11. Abdulhamid Dipopramono, 2017, *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*, Renebook, Jakarta
12. Riawan Tjandra, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
13. Safri Nugraha, dkk., 2007, *Hukum Administrasi Negara*, CLGS FH Universitas Indonesia.
14. Yos Johan Utama, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit UT, Tangerang Selatan.
15. A'an Effendi. Dkk., 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
16. Marbun, SF., 2018, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta

### Peraturan Perundang-undangan:

1. UUD Negara RI 1945
2. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman
4. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
5. UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
6. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. UU No. No. 5 Tahun 1986 jis UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN.

**Putusan Pengadilan**

(dosen menunjukkan putusan pengadilan -MK,MA- yang relevan sesuai topik pertemuan)

## B. PROGRAM PEMBELAJARAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Obyek, Istilah dan definisi Hukum Administrasi	Tinjauan Umum Hukum Administrasi a. Obyek HA b. Istilah HA c. Definisi HA (Daftar Referensi (DR) No. 1 Bab III, IV, V, VI, DR No. 3 Bab I, DR No. 4 Bab I, DR No. 5 Bab 1, DR No. 12, 13, 14, 15)	Ceramah dan Tanya Jawab  (Dosen terlebih dahulu menjelaskan Silabus dan materi pendahuluan sebagai pengantar mata kuliah lalu dilanjutkan dengan tanya jawab sambil mengevaluasi pemahaman mahasiswa peserta mata kuliah).	LCD, White board, Power Point Presentation	2x50 mnt	1. Membaca literatur wajib 2. Mahasiswa memahami materi sesuai dengan penjelasan dosen, dan mencoba memformulasikan pertanyaan/ ide gagasan atau pengetahuannya di kelas	Ketepatan memahami dan menjelaskan obyek, istilah dan definisi Hukum Administrasi  Indikator yang dipakai adalah evaluasi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas yang tercermin dari kemampuan menjawab pertanyaan maupun mengemukakan ide/gagasan/pengetahuan dapat sesuai arahan dosen	5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-3	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Lapangan dan Sejarah Hukum Administrasi serta Kedudukan Hukum Administrasi dalam lapangan ilmu hukum dan hubungannya dengan ilmu lain.	<p>1.Lapangan HA dan Sejarah Perkembangannya</p> <p>a. Lapangan HA</p> <p>b. Sejarah perkembangan HA</p> <p>2.Kedudukan HA dalam lapangan ilmu hukum dan hubungannya dengan ilmu lain</p> <p>a. Kedudukan HA dalam lapangan ilmu hukum</p> <p>b. Hubungan HA dengan hukum lain</p> <p>c. Hubungan HA dengan ilmu lainnya yang obyeknya Pemerintahan</p> <p>(DR No. 3 Bab I, DR No. 4 Bab I, DR No. 5 Bab II)</p>	<p>Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif</p> <p>(Dosen terlebih dahulu menjelaskan Silabus dan materi pendahuluan sebagai pengantar mata kuliah lalu dilanjutkan dengan tanya jawab sambil mengevaluasi pemahaman mahasiswa peserta mata kuliah).</p>	LCD, White board, Power Point Presentation	(TM:1x (2x50)) (BM:1x (1x60))	Mahasiswa memahami materi sesuai dengan penjelasan dosen, dan mencoba memformulasikan pertanyaan/ ide gagasan atau pengetahuannya di kelas.	<p>Ketepatan memahami dan menjelaskan Lapangan dan Sejarah Hukum Administrasi serta Kedudukan Hukum Administrasi dalam lapangan ilmu hukum dan hubungannya dengan ilmu lain</p> <p>Indikator yang dipakai adalah evaluasi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas yang tercermin dari kemampuan menjawab pertanyaan maupun mengemukakan ide/gagasan/pengetahuan dapat sesuai arahan dosen.</p>	5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4-5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Sumber Hukum Administrasi dan Dimensi Normatif Hukum Administrasi	<p>1.Sumber Hukum Administrasi Negara</p> <p>a. Sumber Hukum Formal</p> <p>b. Sumber Hukum Materil</p> <p>c. Sumber Hukum dalam Arti Sosiologis</p> <p>d. Sumber Hukum dalam Arti Sejarah</p> <p>2.Dimensi Normatif HA</p> <p>a. Hk tentang Kekuasaan Pemerintahan</p> <p>b. Hk tentang susunan organisasi pemerintahan dan instrumen tindak pemerintahan</p> <p>c. Hk tentang perlindungan</p>	<p>Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif</p> <p>Dan/atau <b>Tutorial</b></p>	LCD, White board, Power Point Presentation	(TM:1x (2x50)) (BM:1x (1x60))	<p>Mahasiswa memahami materi sesuai dengan penjelasan dosen, dan mencoba memformulasikan pertanyaan/ ide gagasan atau pengetahuannya di kelas.</p>	<p>Ketepatan memahami dan menjelaskan Sumber Hukum Administrasi dan Dimensi Normatif Hukum Administrasi</p> <p>Indikator yang dipakai adalah evaluasi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas yang tercermin dari kemampuan menjawab pertanyaan maupun mengemukakan ide/gagasan/pendapat sesuai arahan dosen.</p>	5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6-7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip <i>wetmatigheid van bestuur</i> , karakteristik tindak pemerintahan, prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dan karakter instrumental.	<p>!. Pemerintah Menurut Hukum</p> <p>a. Prinsip <i>Wetmatigheid van bestuur</i></p> <p>b. Karakter tindak pemerintahan di negara hukum modern</p> <p>c. Prinsip-prinsip negara hukum</p> <p>d. Prinsip-prinsip demokrasi</p> <p>e. Karakter instrumental</p> <p>(DR No. 1 Bab I, II, DR No. 3 Bab II, DR No. 4 Bab I, II, DR No. 5 Bab IV, DR. No. 7 Bab II, DR No.9 Bab I, DR No. 11 Bab I, II, III)</p>	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif  dan/atau <b>Tutorial</b>	LCD, White board, Power Point Presentation	(TM:1x (2x50)) (BM:1x (1x60))	Mahasiswa memahami materi sesuai dengan penjelasan dosen, dan mencoba memformulasikan pertanyaan/ide gagasan atau pengetahuannya di kelas.	Ketepatan memahami dan menjelaskan prinsip <i>wetmatigheid van bestuur</i> , karakteristik tindak pemerintahan, prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dan karakter instrumental  Indikator yang dipakai adalah evaluasi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas yang tercermin dari kemampuan menjawab pertanyaan maupun mengemukakan ide/gagasan/pendapat sesuai arahan dosen.	10%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8-9	Mahasiswa memahami dan menjelaskan macam dan kewenangan.	<p>mampu dan macam-sumber</p> <p>Macam-macam kewenangan pemerintah dan sumber-sumber kewenangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Macam-macam kewenangan pemerintah</li> <li>b. Batasan bagi penggunaan kewenangan pemerintah</li> <li>c. Sumber kewenangan</li> </ul> <p>(DR No. 1 Bab VII, VIII, DR No. 2 Bab IV, DR No. 3 Bab IV, DR No. 4 Bab II, DR No. 5 Bab IV, VI, DR No. 7 Bab II)</p>	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif	LCD, White board, Power Point Presentation	(TM:1x (2x50)) (BM:1x (1x60))	Mahasiswa memahami materi sesuai dengan penjelasan dosen, dan mencoba memformulasikan pertanyaan/ide gagasan atau pengetahuannya di kelas.	<p>Ketepatan memahami dan menjelaskan macam-macam dan sumber kewenangan.</p> <p>Indikator yang dipakai adalah evaluasi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas yang tercermin dari kemampuan menjawab pertanyaan maupun mengemukakan ide/gagasan/pendapat sesuai arahan dosen</p>	5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-11	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Susunan Organisasi Pemerintahan.	<p>1. Diskresi (<i>discretionnaire bevoegdheid</i>) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (<i>Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur</i>)</p> <p>a. Sejarah perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik</p> <p>b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik di beberapa negara</p> <p>c. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hukum positif di Indonesia.</p> <p>2. Susunan organisasi</p>	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif	LCD, White board, Power Point Presentation	(TM:1x (2x50)) (BM:1x (1x60))	Mahasiswa memahami materi sesuai dengan penjelasan dosen, dan mencoba memformulasikan pertanyaan/ ide gagasan atau pengetahuannya di kelas.	<p>Ketepatan memahami dan menjelaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Susunan Organisasi Pemerintahan, dampak lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap kelembagaan pemerintah, kewenangan, diskresi, KTUN dan lain-lain.</p> <p>Indikator yang dipakai adalah evaluasi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas yang tercermin dari kemampuan</p>	5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-13	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Instrumen (sarana) tindak Pemerintahan dan Perbuatan Pemerintah.	<p>1. Instrumen (sarana) tindak Pemerintahan</p> <p>2. Perbuatan Pemerintah</p> <p>a. Perbuatan materiil dan perbuatan hukum</p> <p>b. Perbuatan hukum publik dan perbuatan hukum privat</p> <p>c. Perbuatan hukum bersegi satu dan perbuatan hukum bersegi dua</p> <p>(DR No. 1 Bab VII, DR No. 2 Bab IV, V, VI, DR No. 3 Bab III, V, DR No. 4 Bab III, DR No. 15, DR No. 16, DR No. 5 Bab VI).d. Lembaga DPD</p> <p>e. Lembaga DPRD</p>	<p>Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif</p> <p>dan/atau <b>Tutorial</b></p>	LCD, White board, Power Point Presentation	(TM:1x (2x50)) (BM:1x (1x60))	Mahasiswa memahami materi sesuai dengan penjelasan dosen, dan mencoba memformulasikan pertanyaan/ ide gagasan atau pengetahuannya di kelas.	<p>Ketepatan memahami dan menjelaskan Instrumen (sarana) tindak Pemerintahan dan Perbuatan Pemerintah.</p> <p>Indikator yang dipakai adalah evaluasi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas yang tercermin dari kemampuan menjawab pertanyaan maupun mengemukakan ide/gagasan/pendapat sesuai arahan dosen.</p>	5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Melaksanakan	<b>UTS</b>							
15-16	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pengertian, Jenis-jenis KTUN dan Perbedaan jenis KTUN yang mempunyai relevansi praktis.	Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) a. Pengertian KTUN b. Jenis-Jenis KTUN c. Perbedaan macam KTUN yang mempunyai relevansi praktis  (DR No. 1 Bab VII, DR No. 2 Bab VIII, DR No. 3 Bab IV, DR No. 4 Bab III, DR No. 5 Bab VII)	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif  dan/atau <b>Tutorial</b>	LCD, White board, Power Point Presentation	(TM:1x (2x50)) (BM:1x (1x60))	Mahasiswa memahami materi sesuai dengan penjelasan dosen, dan mencoba memformulasikan pertanyaan/ide gagasan atau pengetahuannya di kelas.	Ketepatan memahami dan menjelaskan Pengertian, Jenis-jenis KTUN dan Perbedaan jenis KTUN yang mempunyai relevansi praktis.  Indikator yang dipakai adalah evaluasi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas yang tercermin dari kemampuan menjawab pertanyaan maupun mengemukakan ide/gagasan/pendapat sesuai arahan dosen.	10%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17-18	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aspek dan kerangka serta kekuatan hukum KTUN	<p>1. Aspek dan Kerangka KTUN</p> <p>a. Aspek <i>legal drafting</i> dari KTUN</p> <p>b. Perbedaan kerangka KTUN (<i>beschikking</i>) dan Peraturan (<i>regeling</i>)</p> <p>2. Kekuatan Hukum</p> <p>a. Kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum materii</p> <p>b. Penarikan kembali sebuah KTUN</p> <p>(DR No. 1 Bab X, DR No. 2 Bab VIII, DR No. 3 Bab IV, DR No. 4 Bab III, DR No. 5 Bab VII)</p>	<p>Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif</p> <p>Dan/atau <b>Tutorial</b></p>	LCD, White board, Power Point Presentation	(TM:1x (3x50)) (BM:1x (1x60))	Mahasiswa memahami materi sesuai dengan penjelasan dosen, dan mencoba memformulasikan pertanyaan/ ide gagasan atau pengetahuannya di kelas.	<p>Ketepatan memahami dan menjelaskan spek dan kerangka serta kekuatan hukum KTUN.</p> <p>Indikator yang dipakai adalah evaluasi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas yang tercermin dari kemampuan menjawab pertanyaan maupun mengemukakan ide/gagasan/pendapat sesuai arahan dosen.</p>	10%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19-20	<p>a. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan KTUN</p> <p>b. Mahasiswa mampu menganalisis KTUN</p>	<p>1. Syarat Sahnya KTUN :</p> <p>a. Syarat Sahnya KTUN menurut Vander Pot</p> <p>b. Syarat sahnya KTUN menurut hukum positif</p> <p>2. KTUN yang tidak sah</p> <p>a. Kemungkinan-kemungkinan tidak terpenuhinya syarat sahnya KTUN</p> <p>b. Akibat hukum dari KTUN yang tidak sah</p> <p>(DR No. 1 Bab IX, DR No. 2 Bab VIII, DR No. 3 Bab IV, DR No. 4 Bab III, DR No. 5 Bab VII)</p>	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif	LCD, White board, Power Point Presentation	(TM:1x (2x50)) (BM:1x (1x60))	<p>a. Mahasiswa belajar menyampaikan ide, gagasan atau pengetahuan di kelas terhadap pertanyaan yang diberikan.</p> <p>b. Mahasiswa belajar mengatur kelompok dan menganalisis sebuah kasus secara bersama serta belajar untuk tampil di depan kelas dan menyampaikan ide, gagasan dan pengetahuan nyadan materi serta aplikasi kasus yang diberikan.</p>	<p>a. Ketepatan memahami dan menjelaskan KTUN.</p> <p>b. Ketepatan menganalisis KTUN.</p> <p>Indikator yang dipakai adalah evaluasi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas yang tercermin dari kemampuan menjawab pertanyaan maupun mengemukakan ide/gagasan/pendapat sesuai arahan dosen.</p>	10%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-22	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian, karakteristik, macam-macam sanksi administrasi dan kumulasi sanksi administrasi.	<p>Penegakan Hukum Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian penegakan HA</li> <li>b. Karakteristik Penegakan HA dengan Hk. Pidana</li> <li>c. Sanksi administrasi yang bersifat umum dan sektoral</li> <li>d. Macam-macam sanksi</li> <li>e. Pengenaan sanksi secara kumulatif</li> </ol> <p>(DR No. 3 Bab VIII, DR No. 4 Bab V)</p>	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif	LCD, White board, Power Point Presentation	(TM:1x (3x50)) (BM:1x (1x60))	Mahasiswa memahami materi sesuai dengan penjelasan dosen, dan mencoba memformulasikan pertanyaan/ide gagasan atau pengetahuannya di kelas.	<p>Ketepatan memahami dan menjelaskan pengertian, karakteristik, macam-macam sanksi administrasi dan kumulasi sanksi administrasi.</p> <p>Indikator yang dipakai adalah evaluasi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas yang tercermin dari kemampuan menjawab pertanyaan maupun mengemukakan ide/gagasan/pendapat sesuai arahan dosen.</p>	10%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23-24	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum preventif dan represif.	<p>1. Perlindungan Hukum</p> <p>a. Pengertian perlindungan hukum</p> <p>b. Sarana perlindungan hukum preventif</p> <p>c. Sarana perlindungan hukum represif</p> <p>2. Perlindungan hukum yudisial, administratif dan non yudisial</p>	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif	LCD, White board, Power Point Presentation	(TM:1x (2x50)) (BM:1x (1x60))	Mahasiswa memahami materi sesuai dengan penjelasan dosen, dan mencoba memformulasikan pertanyaan/ide gagasan atau pengetahuannya di kelas.	<p>Ketepatan memahami dan menjelaskan pengertian perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum preventif dan represif serta perlindungan hukum yudisial, administratif dan non yudisial.</p> <p>Indikator yang dipakai adalah evaluasi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas yang tercermin dari kemampuan menjawab pertanyaan maupun</p>	5%	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Ombudsman dan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah	Perlindungan Hukum a. Ombudsman b. Perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah (DR No. 3 Bab X, DR. No 8)	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi Interaktif	LCD, White board, Power Point Presentation	(TM:1x (2x50)) (BM:1x (1x60))	Mahasiswa memahami materi sesuai dengan penjelasan dosen, dan mencoba memformulasikan pertanyaan/ ide gagasan atau pengetahuannya di kelas.	Ketepatan memahami dan menjelaskan Instrumen (sarana) tindak Pemerintahan dan Perbuatan Pemerintah.  Indikator yang dipakai adalah evaluasi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas yang tercermin dari kemampuan menjawab pertanyaan maupun mengemukakan ide/gagasan/pendapat sesuai arahan	5%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	<p><b>Mahasiswa Mampu memahami dan menjelaskan Peradilan Tata Usaha Negara</b></p>	<p>Peradilan Tata Usaha Negara (<b>Hanya pengantar (Berkaitan dengan karakteristik dan prinsip-prinsip PTUN) dikarenakan materi akan diberikan untuk Mata Kuliah Hukum Acara PTUN dan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara</b>)</p> <p>(DR No. 1 Bab IX, DR No. 2 Bab XIV, DR No. 3 Bab XI, DR No. 5 Bab XIV, DR No. 6, DR No. 14 dan DR No. 15)</p>	Ceramah dan Tanya Jawab	MEDIA,LCD, VIDEO, TUTORIAL	(TM:1x (2x50)) (BM:1x (1x60))	Mahasiswa memahami materi sesuai dengan penjelasan dosen, dan mencoba memformulasikan pertanyaan/ide gagasan atau pengetahuannya di kelas.	Ketepatan memahami dan menjelaskan PTUN.  Indikator yang dipakai adalah evaluasi kualitas pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dibahas dari kemampuan menjawab pertanyaan maupun mengemukakan ide/gagasan/pendapat sesuai arahan dosen.	10%	
27	<b>MELAKSANAKAN UAS</b>								